

INDONESIA MENUJU KEHIDUPAN NORMAL BARU:

**Tinjauan Pembangunan
Ekonomi dan Teknologi**

POLICY PAPER



The Habibie Center

Jakarta, 25 Juni 2020

Tentang The Habibie Center

The Habibie Center didirikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie dan keluarga sebagai organisasi independen, nonpemerintah dan nonprofit. The Habibie Center memiliki visi untuk memajukan usaha modernisasi dan demokratisasi di Indonesia yang didasarkan pada moralitas dan integritas budaya dan nilai-nilai agama.

The Habibie Center memiliki misi, yang pertama menciptakan masyarakat demokratis secara kultural dan struktural yang mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengkaji dan mengangkat isu-isu perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia dan yang kedua adalah memajukan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan usaha sosialisasi teknologi.

Tim Penyusun:

Dr.-Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A.

Zamroni Salim, Ph.D.

Prof. Firmanzah, Ph.D.

Umar Juoro, M.A., M.A.P.E.

Dr. Ir. Didit H. A. Ratam, M.B.A.

Mohammad Hasan Ansori, Ph.D.

Hadi Kuntjara, Ph.D.



Latar Belakang

Sebelum merebaknya Covid-19, pertumbuhan ekonomi dunia 2020 diperkirakan tumbuh 3,4% meskipun saat itu (sebelum pandemi) dunia menghadapi masalah besar yaitu perang dagang US-China dan British Exit. Pertumbuhan ekonomi dunia masih dibilang *on the track*, sampai masa di mana Covid-19 telah mengoreksi secara drastis pertumbuhan ekonomi dunia. Tidak ada negara yang siap menghadapi pandemi ini. Krisis global (*global meltdown*) terjadi karena menurunnya *supply & demand* (Baldwin & Mauro, 2020), sebagai akibat terbatasnya pergerakan barang dan jasa, tenaga kerja (*labor mobility*), interaksi ekonomi, sosial dan politik yang akhirnya menurunkan produktivitas ekonomi dunia.

Lesunya perekonomian dunia, turunnya harga minyak mentah dan melambatnya aliran modal, menyebabkan *global tension*. Hutang korporasi dan *sovereign debt* diperkirakan menjadi isu krusial bagi banyak negara, karena lemahnya kemampuan membayar. Tataan ekonomi politik suatu negara ikut mempengaruhi kesuksesan negara dalam mengatasi Covid-19 (Kenworthy, 2020), *governance factor* berpengaruh dalam menangani pandemi, tanpa melihat sistem negara yang dianut, demokratis/tidak. Apa pola dan strategi

Indonesia dalam menangani pandemi sekaligus membangun kembali ekonomi Indonesia pasca Covid-19? Penanganan yang bersifat *state-led* dan agresif bisa diambil sebagai *lesson learned* bagi Indonesia dalam merespons pandemi secara baik dan efisien meskipun diketahui bahwa tipe ekonomi politik Indonesia cenderung *capitalist democracy* (Pepinsky, 2020).

Covid-19 akan berdampak pada munculnya tren baru seperti kemungkinan munculnya deglobalisasi, *stronger localization*, dan makin pentingnya *online activities* dan *data services* dalam mendukung perekonomian. *Automation* di sejumlah sektor ekonomi diperkirakan akan meningkat pesat, namun globalisasi masih akan dominan dibanding lokalisasi. Dari semua itu adalah munculnya “*the new normal*” setelah pandemi Covid-19 ini. *New Normal* sebagai kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang disesuaikan dengan protokol kesehatan dalam masa selama dan pasca pandemi Covid-19. Perspektif optimis perlu ditekankan dalam mencari solusi pandemi Covid-19.

Tujuan

Policy Paper ini bertujuan memberikan masukan kepada pemerintah dan publik dalam menghadapi pandemi dan pasca pandemi (*New Normal*) dengan mengutamakan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan ekonomi Indonesia. Masukan dalam *Policy Paper* ini disesuaikan dengan karakter *The Habibie Center* (THC) terkait dengan *science-data-based* dan demokrasi. Naskah ini diharapkan memberikan energi positif/optimisme dalam menghadapi pandemi Covid-19, yaitu:

1. *Macro-level*: permasalahan makro ekonomi Indonesia, termasuk permasalahan teknologi dan penggunaannya untuk menangani Covid-19
2. *Micro-level/Firm level*: permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri di Indonesia: produksi dan pemanfaatan teknologi di level perusahaan di masa *New Normal*.
3. *Society level* (perilaku antar masyarakat): interaksi antar masyarakat menjadi penentu keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan teknologi dalam *New Normal*.



Fakta Empiris

Pandemi Covid-19 dan New Normal di Indonesia

MACROECONOMIC LEVEL

Bank Dunia memprediksi, perekonomian Indonesia tahun ini bisa tumbuh nol persen (MSN, 2020). Pertumbuhan ekonomi 0% relatif lebih baik dibandingkan dengan semakin kuatnya tekanan pada perekonomian dunia yang diprediksi berkontraksi -6% sampai -7%. Di sejumlah kesempatan, Menteri Keuangan RI menyampaikan skenario terburuk pertumbuhan ekonomi 2020 di angka -0.4 sampai 1%. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dilihat dari menurunnya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia karena lemahnya daya beli (*purchasing power*) akibat menurunnya pendapatan.

Anggaran nasional penanganan Covid-19 sekitar Rp 695,2 triliun: perlindungan sosial Rp 203,9 T, UMKM 123,46 T, insentif usaha 120,61 T, sektoral K/L dan pemda 106,11 T, kesehatan 87,55 T, pembiayaan korporasi 53,57 T, yang beresiko memperlebar defisit APBN 6,72% dari PDB (Kemenkeu, 2020). Pemerintah perlu berhati-hati dalam menetapkan besaran defisit APBN sebagaimana diatur dalam

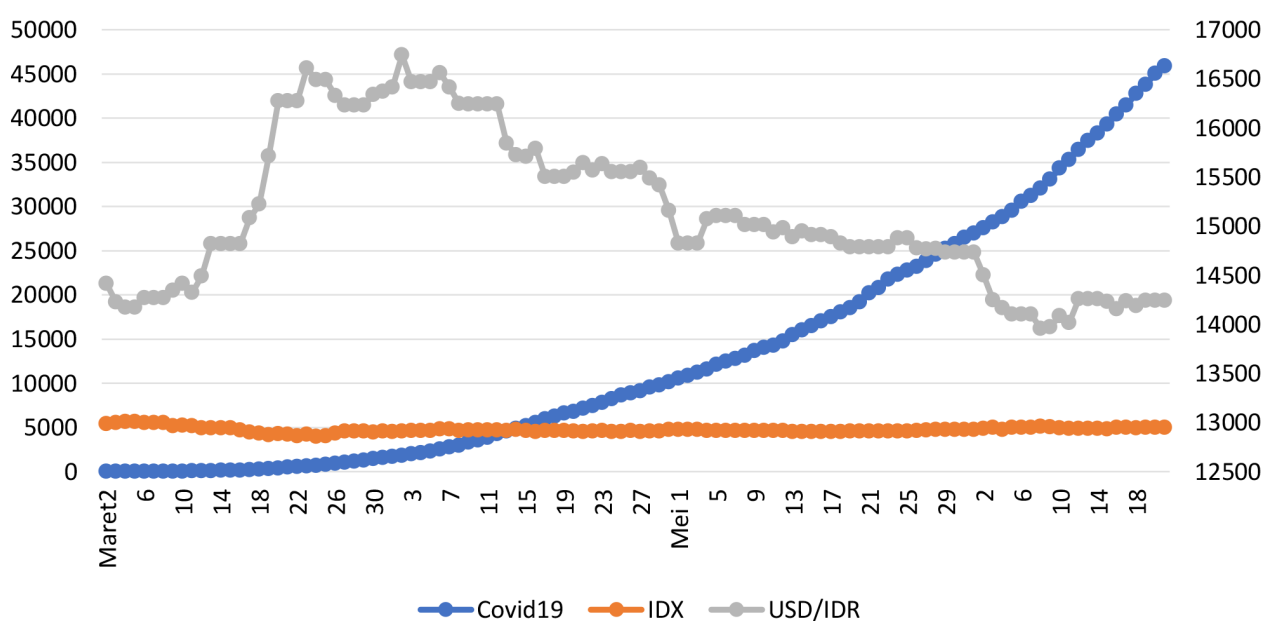
UU No. 2/2020 yang batasan angkanya terbuka, dengan menerapkan sejumlah azas yaitu keterbukaan (*transparansi*), pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) dan kehati-hatian (*prudential*). Mereka yang diberi suntikan dana adalah yang mengalami kesulitan karena dampak Covid-19, bukan karena hal lain misalnya mis-management, dengan melihat kinerja, *cash-flow balancing*, dan CAR (untuk bank), *no free riders*. Pembiayaan defisit terutama dari hutang dengan penerbitan SBN dengan sasaran pembeli dalam negeri. Intervensi BI di pasar primer hanya untuk menjaga stabilitas *yield*, bukan membiayai defisit dengan mencetak uang, karena langkah ini akan menurunkan kredibilitas BI, komplikasi legal-ekonomi dan beresiko berdampak pada inflasi.

Nilai tukar Rupiah, perlu terus dijaga dalam rentan yang aman bagi perekonomian. Dalam awal masa pandemi Rupiah mengalami pelemahan karena adanya kekhawatiran pihak investor asing terhadap penyebaran virus corona di Indonesia. Keberhasilan penanganan Pandemi Covid-19 akan menentukan juga upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia terus melakukan langkah stabilisasi melalui

sejumlah kebijakan yang telah dilakukan. Dengan pergerakan angka ini, bila dibandingkan dengan nilai tukar akhir 2019, Rupiah terdepresiasi 8,77 persen. Depresiasi yang tidak bisa disamakan dengan krisis 1998.

Pada sektor perdagangan internasional juga mengalami perlambatan akibat melemahnya pertumbuhan industri dalam negeri dan menurunnya permintaan dunia. Lesunya permintaan dunia disebabkan

Gambar 1. Kasus Covid-19, IDX dan IDR



sejumlah faktor seperti perang dagang AS-China, negara mitra yang cenderung *inward looking* dengan berbagai kebijakan yang lebih protektif (termasuk meningkatnya penggunaan *Non-Tariff Measures* - NTM) dalam menghadang produk impor, yang seharusnya dihindari untuk mendukung perdagangan global yang sedang melesu (OECD, 2020). Kondisi ini tentu akan semakin menekan kontribusi sektor perdagangan luar negeri pada perekonomian Indonesia. Pandemi berkontribusi pada penurunan

konsumsi masyarakat karena turunnya daya beli mereka. Tingkat konsumsi masyarakat turun (khususnya konsumsi rumah tangga) yang tumbuh 2,84% (tahun 2019 dengan periode sama, tumbuh 5.02%) (BPS, 2020). Konsumsi makanan dan kebutuhan pokok sebesar 44% dari total konsumsi rumah tangga. Konsumsi lainnya (non pangan) berkontraksi selama kuartal I (konsumsi pakaian dan alas kaki -3,29%, transportasi -1,81%). Sementara konsumsi untuk kesehatan dan pendidikan masih positif sebesar 7,85%.

Melambatnya konsumsi masyarakat sedikit terbantu dengan stabilnya inflasi (2.67%, yoy) karena harga pangan yang stabil.

Data dari BKPM, selama triwulan I 2020, investasi di Indonesia masih tumbuh sekitar 8% (dibandingkan 2019, TW I, yoy). Secara kuartalan, investasi kuartal I 2020 tumbuh 1,2% dibandingkan periode yang sama 2019 yang nilai realisasinya Rp. 208,6 triliun. Pertumbuhan investasi di kuartal berikutnya mungkin akan melambat. Pandemi Covid-19 akan memberikan dampak pada penurunan aliran modal antarnegara. Indonesia harus bisa terus mendorong aliran modal untuk masuk ke sektor-sektor produktif seperti sektor kesehatan, industri berbasis digital, dan lainnya (UNCTAD, 2020). Penurunan tingkat suku bunga diharapkan bisa mendorong investasi langsung di Indonesia, bersamaan dengan kebijakan stimulus fiskal, penurunan tarif pajak penghasilan perusahaan (UU No 2/2020).

Dalam *New Normal* kebutuhan penggunaan teknologi/otomasi akan meningkat jauh lebih pesat, karena adanya penurunan rasio pemakaian tenaga kerja di sektor produksi (padat karya ke padat modal). Namun, ada efek samping yaitu meningkatnya pengangguran (khususnya yang tidak terdidik/terlatih/berlatar belakang digital/teknologi). Laporan Menteri Ketenagakerjaan pada awal Mei 2020 mencatat ada lebih dari 1,7

juta tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan, terdiri dari 1.032.960 buruh dirumahkan, 375.165 buruh di-PHK, dan 314.833 orang di sektor informal berhenti. Pengangguran terkait dengan *informality* juga membesar. Angka riil pengangguran mungkin lebih besar, mengingat banyak perusahaan yang tidak melaporkan jumlah pegawainya yang di-PHK. Menurut Kemenko Perekonomian jumlah pengangguran akibat Covid-19 bisa bertambah hingga 3,05 juta orang, per 2 Juni 2020, sedangkan pada skenario sangat berat angkanya bisa mencapai 5,23 juta orang. Dari perhitungan BPS, per Februari 2020 angka pengangguran Indonesia berada pada 6,88 juta orang. Pengangguran menjadi masalah makro multi dimensional. Indonesia perlu meningkatkan literasi teknologi/digital, namun tingginya persentase pekerja yang berpendidikan rendah menjadi kendala untuk literasi teknologi/digital.

Dalam hubungannya dengan teknologi sebagai bagian dari langkah meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah perlu memperhatikan sektor-sektor ekonomi yang terdampak dan sektor-sektor ekonomi yang masih tumbuh positif. Pemerintah bisa mendorong investasi di bidang IT yang mampu mendukung produktivitas industri nasional berbasis teknologi, juga investasi untuk produksi obat-obatan, alat dan fasilitas kesehatan. Aspek teknologi juga bisa masuk ke sisi konsumsi, meski selama

ini konsentrasi masih pada konsumsi bahan makanan. Karena kebutuhan, konsumsi produk/jasa berbasis teknologi digital akan meningkat. Hal ini tentu menjadi positif dalam menumbuhkan perekonomian. Perhatian pemerintah untuk penemuan vaksin Covid-19 harus menjadi prioritas nasional melalui insentif *Research and Development* (R&D) di lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Pemanfaatan teknologi digital bisa dilakukan untuk mendukung pola kerja di lembaga pemerintah (melalui *working from home*) termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk pemutakhiran data kependudukan, untuk mendukung program penanggulangan kelompok terdampak Covid-19 dan fungsi data lainnya.

MICROECONOMIC LEVEL/FIRM LEVEL

Di masa pandemi Covid-19 ini UMKM menghadapi masa yang lebih sulit dari 1998. Di masa pandemi ini, krisis terjadi di sisi *supply* dan *demand*. Pandemi Covid-19 berdampak sangat besar terhadap sektor industri; pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Di sektor logistik, sejumlah perusahaan melakukan pengetatan anggaran dengan melepas tenaga kerja kontrak/harian. Menurut sejumlah Asosiasi terkait, industri tekstil dan produk tekstil juga mengalami pengurangan utilisasi hingga 90 persen dan volume produksi hingga 85 persen. Menurunnya

produktivitas dan daya serap tenaga kerja berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun tidak kebal dari dampak pandemi Covid-19. BUMN yang terdampak cukup parah antara lain perbankan akibat meningkatnya kredit bermasalah (NPL), khususnya yang membiayai proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Pelemahan nilai tukar rupiah juga berdampak buruk terhadap PLN dan Pertamina. Anggaran penanganan Covid-19 melalui stimulus fiskal harusnya lebih banyak dialokasikan untuk segala aktivitas yang bisa meredam melajunya penyebaran Covid-19 seperti pelaksanaan *rapid test*, PCR, dan lainnya. Alokasi dana untuk dunia industri harus diutamakan kepada usaha di bidang kesehatan dalam upaya penemuan vaksin Vovid-19, produksi dan penyediaan obat-obatan dan sarana kesehatan lainnya.

‘Inovasi’ menjadi kata kunci di tengah pandemi Covid-19. Terdapat sejumlah perubahan karakter inovasi selama krisis Covid-19 (The Economist, 2020): (1) perusahaan dipaksa untuk melakukan inovasi dan meningkatkan efisiensi secara murah. (2) perusahaan menjadi lebih terbuka terhadap kerjasama dalam melakukan inovasi (misal dalam menemukan vaksin virus corona), lebih terbuka untuk saling bertukar data dan informasi dan

mau mendengar masukan (dari banyak sumber termasuk konsumen sendiri) untuk pengembangan produknya. (3) perusahaan dipaksa melakukan inovasi dengan cepat.

Adaptasi teknologi robotik, digital dan otomasi yang semakin luas di dunia industri adalah sebuah keniscayaan. Pandemi Covid-19 memaksa dan mempercepat proses adaptasi tersebut. Tren industri ke depan yang menonjol akan berbasis pada bidang kesehatan (*tracing, telemedicine*, dan lainnya) dan industri yang bergerak di bidang digitalisasi (*automatisasi*). Perusahaan-perusahaan akan terdorong untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi, robot, digitilisasi, dan otomasi untuk mengurangi interaksi dengan konsumen dan mengurangi jumlah pekerja yang harus hadir secara fisik.

Di sektor UMKM, pandemi dapat menjadi momentum peralihan menuju pemanfaatan teknologi digital secara lebih masif. Setidaknya ada tiga sektor yang relatif tidak terganggu di masa Covid 19 ini yaitu perusahaan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), farmasi, dan produk kesehatan. Pelaku UMKM juga semakin banyak yang memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya. Pelaku UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem *marketplace/platform* digital lain selama masa pandemi mengalami

kenaikan omset jika dibanding mereka yang masih mengandalkan transaksi *offline*. Perusahaan besar juga dipaksa lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi. Pemerintah perlu mendorong mereka untuk mengakselerasi pemanfaatan teknologi. Otomasi berbasis AI dan *big data* dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Perusahaan-perusahaan yang telah beradaptasi dengan teknologi informasi sebelum pandemi cenderung lebih tahan terhadap dampak negatif pandemi.

SOSIAL MASYARAKAT (SOCIETY LEVEL)

Terdapat sejumlah indikator yang harus dipenuhi dalam *New Normal* sesuai dengan kriteria dari *World Health Organization* (WHO): (1) angka reproduksi dasar (*Basic Reproductive Number*) Covid-19 di suatu wilayah harus di bawah angka 1. Saat ini, di Indonesia diperkirakan berada di angka 2,5 artinya bahwa satu orang dapat menularkan penyakit ke 2-3 orang lainnya. Pemerintah harus bisa memastikan hingga jumlah kasus positif mengalami perlambatan. Sampai saat ini, kasus Covid-19 masih terus bertambah. (2) kapasitas sistem kesehatan untuk pasien Covid-19 harus memadai (jumlah fasilitas, tempat tidur, tenaga kesehatan). Sistem kesehatan harus mampu mengidentifikasi, tes secara masif, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien Covid-19. (3) resiko penularan virus corona di tempat-

tempat yang mempunyai kerentanan tinggi sudah dapat terkendali. (4) berbagai tempat publik seperti sekolah, perkantoran harus dapat menerapkan protokol pencegahan penularan Covid-19.

Kondisi *New Normal* di tengah pandemi Covid-19 akan mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat, dan mengubah preferensi konsumen. Protokol kesehatan wajib diterapkan di tempat publik seperti sekolah, kantor, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata dan lainnya.

Transportasi publik dapat beroperasi kembali dengan aturan yang ketat. Pemerintah harus bisa menyediakan sarana transportasi publik yang mencukupi ketika swasta hanya bisa menyediakan sebagian (*New Normal*); juga di sektor kesehatan (rumah sakit, puskesmas), pendidikan (sekolah). Perilaku konsumsi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 juga mengalami perubahan, orang-orang lebih memilih berbelanja secara *online*. Para produsen harus menerapkan standar dan prosedur kesehatan yang ketat (pengiriman tanpa

Tabel 1. Pembangunan Ekonomi dan Teknologi dalam Mendukung New Normal Pasca Covid-19

	Pembangunan Ekonomi	Teknologi
Makro	● Stabilitas nilai tukar Rupiah perlu terus dijaga untuk menjaga kepercayaan pelaku ekonomi ● Penanganan masalah pengangguran untuk meningkatkan daya beli masyarakat (rumah tangga di bawah garis kemiskinan, miskin dan rentan PHK). ● Inflasi perlu dijaga di bawah 5%, agar pertumbuhan ekonomi tidak mengalami kontraksi berlebih. ● Kebijakan anggaran, defisit anggaran dengan berpatokan pada azas transparansi, akuntabilitas dan prudensial. ● Perluasan pasar ekspor, kontrol impor produk kesehatan dibarengi produksi dalam negeri yang mencukupi.	● Peningkatan peran R&D, inovasi nasional, dan Perguruan Tinggi. Jangka pendek difokuskan pada penemuan vaksin dan obat-obatan Covid-19. ● Pemanfaatan teknologi digital di lembaga pemerintah termasuk yang melalui <i>working from home</i>. ● Pemutakhiran data kependudukan (sekarang basis data masih 2014) dengan memanfaatkan teknologi digital, untuk mendukung program penanggulangan kelompok terdampak Covid-19 dan fungsi lainnya. ● Mendorong investasi di bidang IT/Broadband internet, industri obat-obatan, alat dan fasilitas kesehatan.
Mikro	● Terkendalanya sektor distribusi dan logistik karena PSBB dan lainnya mempengaruhi pasokan bahan baku dan pemasaran dunia bisnis. ● Sektor-sektor terkait dengan aktivitas pergerakan orang, logistik, dan distribusi menerima dampak besar dari Covid-19., Penurunan produktivitas UMKM berdampak besar pada perekonomian nasional. ● 'Inovasi' menjadi kata kunci bagi perusahaan untuk survive di tengah pandemi dan masa <i>New Normal</i>.	● Pemanfaatan teknologi internet untuk manajemen (pemasaran) yang lebih luas/termasuk <i>e-commerce</i>. ● Pembentukan aplikasi pendeteksi Covid-19 per orang, bukan sekedar per wilayah besar. ● Mendorong Biofarma dan perusahaan lain untuk memproduksi vaksin, obat-obatan. ● Mendorong pembuatan sistem informasi/aplikasi kecerdasan buatan (AI): untuk perkembangan data kasus dan pelacakan pasien COVID-19.
Sosial-	● Pola belanja masyarakat berubah ke arah belanja <i>online</i>. ● Masyarakat akan lebih sensitif terhadap kesehatannya. ● Protokol kesehatan wajib diterapkan di tempat-tempat publik (sekolah/kantor/pusat perbelanjaan/tempat wisata). ● Transportasi publik dengan aturan yang ketat.	● Pemanfaatan aplikasi AI pendeteksi Covid-19 per orang. ● Belanja daring: <i>e-commerce, e-logistic, online, cash-less, juga hiburan daring</i>. ● Kegiatan belajar dan pelatihan secara daring (<i>Tele-education and training</i>).

kontak, transaksi non-tunai (*cashless*). Trend konsumen peduli dengan kesehatan akan lebih mengecek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa untuk produk kesehatan dan pangan. Konsumsi di sektor kesehatan akan meningkat lebih pesat (obat-obatan, perlengkapan kesehatan, pelayanan kesehatan dan asuransi serta jasa lainnya).

Ketika pemerintah menerapkan *social/physical distancing*, maka ada pihak lain yang juga lebih dirugikan dari sekedar dampak Covid-19, karena adanya sarana kesehatan/puskesmas yang dibatasi pelayanannya. Hal ini memberikan dampak buruk pada penderita penyakit tertentu yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara kontinyu (contoh: penderita TBC, ispa dan lainnya), dan balita yang memerlukan layanan kesehatan rutin, cenderung terabaikan.

Rencana pemerintah memperlonggar PSBB dan menerima *New Normal* di sejumlah daerah harus ditangani dengan baik. Saat ini ada sekitar 102 daerah yang dinyatakan dalam zona hijau, diberikan kewenangan untuk masuk *New Normal*. Pemberlakuan *New Normal* perlu dilakukan secara hati-hati dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah penambahan Covid-19 masih terus berlangsung. Ada permasalahan birokrasi yang mengemuka di sejumlah daerah; hubungan yang tidak harmonis antara pusat dan daerah, antara

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi halangan tersendiri untuk penanganan pandemi yang lebih efektif. Penerapan pelonggaran menuju *New Normal* harus dilakukan dengan protokol kesehatan Covid-19 melalui pengetesan Covid-19 di sejumlah wilayah dan memantau pergerakan PDP dan ODP. Berbagai langkah penyesuaian dan pelaksanaan *New Normal* di berbagai sektor kehidupan ekonomi sosial masyarakat, hendaknya didasarkan pada *Science-Data-based Economy*.

Saran Kebijakan

Macro level - Pemerintah:

Perlu perubahan cara pandang pemerintah dalam menangani bencana nasional tidak hanya berbasis pada bencana alam tetapi juga pandemi. Pelaksanaan UU No. 2/2020 harus menerapkan azas transparansi, akuntabilitas, dan *prudential*, jangan sampai hanya sekedar berlindung di balik pasal 27 UU tersebut. Badan usaha yang dibantu haruslah mereka yang murni mengalami kelesuan usaha/kerugian karena dampak pandemi. Relokasi anggaran dilakukan ke sektor-sektor yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi, terutama sektor UMKM. Perlu investasi penyediaan sarana fisik moda transportasi, gedung sekolah/fasilitas kesehatan, termasuk sarana penunjang berbasis teknologi digital, dengan pemerintah sebagai penggerak.

Struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh konsumsi domestik, maka pilihan kebijakan yang diambil harus bisa mendorong tetap tumbuhnya konsumsi (*demand side*). Pemerintah sudah melakukan pengurangan pajak, batasan pendapatan kena pajak, namun belum mampu mendorong kegiatan konsumsi masyarakat (khususnya level rumah tangga) karena PHK/*unemployment* dan menurunnya daya

beli. Hal-hal yang kontraproduktif terhadap peningkatan konsumsi (naiknya iuran BPJS, biaya listrik, Tapera dan lainnya) perlu ditinjau ulang terkait dengan *timing*. Di sini perlunya *tariff coordination policy*, sehingga ada koordinasi yang baik dalam menentukan harga produk kebutuhan pokok masyarakat (khususnya *administered price* - dimana pemerintah bisa ikut mempengaruhinya).

Pengembangan SDM berbasis digital menjadi suatu kewajiban dengan dibarengi peningkatan literasi teknologi/digital. Tumbuh kembangnya industri digital berdampak pada semakin meningkatnya penggunaan modal/teknologi di industri untuk meningkatkan produktivitasnya. Hal ini untuk mengimbangi menurunnya produktivitas di sejumlah sektor karena terbatasnya kesempatan kerja dan mobilitas pekerja. Yang harus diperhatikan adalah kehidupan/kesehatan (*live*), baru pertimbangan mata pencaharian/mencari nafkah (*livelihood*).

Micro Level - Perusahaan:

Pemerintah perlu membantu dunia usaha dalam memasuki *New Normal*. Keputusan MenKes No. HK.01.07/MENKES/328/2020 mengimbau pelaku usaha dan industri

untuk menyiapkan sejumlah protokol kesehatan. Pemberian insentif pajak terhadap sejumlah sektor terdampak dalam PMK No. 44/PMK.03/2020, perlu diperluas KLU dan jangkauan sektor industrinya (termasuk WP KITE dan WP Kawasan Berikat) dan diperpanjang, untuk: insentif pengembalian PPN, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Dari sisi prioritas, pengembalian PPN lebih diprioritaskan karena terkait langsung dengan *cash-flow* perusahaan dan insentif bersifat produktif (mereka yang tidak produktif tidak memperolehnya). Perluasan jangkauan sektor bisa diarahkan ke sektor yang terkena dampak parah seperti pariwisata dan sektor-sektor pendukungnya, termasuk transportasi, perhotelan dan makanan-minuman/katering, kimia-farmasi, elektronika, otomotif dan tekstil. Transformasi industri 4.0 disesuaikan dengan revitalisasi industri pasca pandemi. Program pendidikan ketrampilan dan pra-kerja perlu diperluas dan dibuat lebih efektif disesuaikan dengan pengembangan kualitas SDM, transformasi industri 4.0 dan revitalisasi industri pasca pandemi.

Social Level:

Rapid test secara lebih *massive* dan tanpa biaya (*free*) perlu dilakukan dengan

memanfaatkan teknologi (termasuk AI). Sosialisasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi syarat utama keberhasilan penanganan Covid-19 dan *New Normal*. Aturan pelaksanaan *New Normal* harus dibuat secara jelas, terpadu dan dengan *law enforcement* yang kuat. Pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak keamanan untuk bekerja secara tepat dan terukur di tempat-tempat umum demi ketertiban jalannya *New Normal*. Kebijakan yang kuat untuk memproteksi lapangan pekerjaan/upah sangat diperlukan Indonesia untuk meningkatkan daya beli dan menekan ongkos ekonomi akibat krisis Covid-19.

Daftar Pustaka

- Baldwin, Richard and Beatrice Weder di Mauro. (2020). *Economics in the Time of Covid-19*. London: CEPR Press, 2020.
- BBC. (2020). Coronavirus: Will Covid-19 speed up the use of robots to replace human workers? <https://www.bbc.com/news/technology-52340651>
- BPS. (2020). Konsumsi dan Pengeluaran. <https://www.bps.go.id/subject/5/konsumsi-dan-pengeluaran.html#subjekViewTab3>
- Ding, Wenzhi et al. (2020). *Corporate Immunity to the Covid-19 Pandemic*. (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3578585).
- Economist. (2020a). (<https://www.economist.com/briefing/2020/04/30/the-90-economy-that-lock-downs-will-leave-behind>).
- Economist. (2020b). (<https://www.economist.com/business/2020/04/25/the-pandemic-is-liberating-firms-to-experiment-with-radical-new-ideas>).
- Economist. (2020c). <https://www.economist.com/business/2020/04/25/the-pandemic-is-liberating-firms-to-experiment-with-radical-new-ideas>
- Gugus Tugas Covid-19. (2020). <https://www.Covid19.go.id>
- Kemenparekraf. (2020). Siaran Pers Penurunan Kunjungan Wisman ke Indonesia Akibat Pandemi Covid-19 Sesuai Perkiraan <http://www.kemenparekraf.go.id/post/siaran-pers-penurunan-kunjungan-wisman-ke-indonesia-akibat-pandemi-Covid-19-sesuai-perkiraan>).
- MSN. (2020). <https://www.msn.com/id-id/video/tv/bank-dunia-ekonomi-indonesia-bisa-nol-persen/vi-BB15gSsF>
- NYMag.com (2020). (<https://nymag.com/intelligencer/2020/04/the-companies-that-stand-to-profit-from-the-coronavirus.html>).
- Kenworthy, Lan. (2020). *Social Democratic Capitalism*, diambil dari <https://items.ssrc.org/Covid-19-and-the-social-sciences/democracy-and-pandemics/political-economy-and-democratic-capacity-to-respond-to-pandemics/>

KepMenKes No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

OECD. (2020). *OECD Policy Responses to Coronavirus (Covid-19)*

PMK No. 44/2020 Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Pepinsky, Thomas. (2020). *Political Economy and Democratic Capacity to Respond to Pandemics*. Diambil dari <https://items.ssrc.org/Covid-19-and-the-social-sciences/democracy-and-pandemics/political-economy-and-democratic-capacity-to-respond-to-pandemics/>

UU 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang



Jl. Kemang Selatan no. 98 Jakarta 12560 - Indonesia
Phone: (62-21) 7817211 | Fax: (62-21) 7817212
E-mail: thc@habibiecenter.or.id
Website: www.habibiecenter.or.id